



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **USMANDI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **144239**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 977.500.000

1. Bangunan Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 712.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/14 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 76.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET CHEVROLET CAPTIVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA 1KP AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 100.400.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.032.739

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.157.932.739

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.157.932.739

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**UNIT KERJA** : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ASROL JADIID
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 269828

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 149.900.000

1. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 31.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/60 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 118.400.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 72.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR NF 125 SD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR 125 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 13.176.800

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 39.070.992

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 274.147.792

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 274.147.792

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.